



Sekolah Kader Oleh DPC PDI Perjuangan Bantul

Wellyana¹, Romadhona Kusuma Yudha²

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

wellyana@umb.ac.id, romadhonakusumayudha@umb.ac.id

Abstrak

Partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara. Dan di dalam sebuah negara demokrasi, partai mempunyai beberapa peranan penting yang salah satunya adalah peran dalam sosialisasi politik. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali partai politik, namun dari sekian banyaknya partai yang ada di Indonesia masih sedikit sekali partai yang memandang bahwa sekolah kader atau pendidikan partai sebagai bagian dari fungsi sosialisasi politik. Hingga akhirnya PDI Perjuangan membuat sebuah gagasan terbaru dalam sosialisasi politik dengan membentuk sekolah kader menjelang PILKADA serentak yang diadakan di Indonesia beberapa waktu lalu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran partai politik dalam sosialisasi politik (studi kasus sekolah kader oleh DPC PDI Perjuangan Bantul Tahun 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengurus DPC PDI Perjuangan Bantul. Objek penelitiannya adalah peran partai politik PDI Perjuangan dalam sosialisasi politik (studi kasus sekolah kader oleh DPC PDI Perjuangan Bantul 2016). Instrumen penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai politik dalam sosialisasi politik (studi kasus sekolah kader oleh DPC PDI Perjuangan Bantul Tahun 2016) telah berlangsung dan dilaksanakan dengan cukup baik. Kesimpulan tersebut didukung dengan adanya upaya DPC PDI Perjuangan Bantul dalam membentuk sikap politik kader partai baik melalui sekolah kader, sistem kaderisasi, diskusi formal maupun informal. Dan didirikannya sekolah kader bagi para calon kepala daerah sendiri adalah bertujuan untuk membentuk calon kepala daerah yang memiliki komitmen dalam menjalankan ideologi partai dan Trisakti, sebagai bagian dari pertahanan kedaulatan politik, ekonomi dan kebudayaan Nasional.

Kata Kunci: *Partai Politik, Sosialisasi Politik, Sekolah Kader.*

Abstract

Political parties are one of the important elements in a country. And in a democratic country, parties have several important roles, one of which is a role in political socialization. In Indonesia itself there are a lot of political parties, but of the many parties in Indonesia, there are still very few parties that view cadre schools or party education as part of the function of political socialization. Until finally the PDI-P made a new idea in political socialization by forming a cadre school ahead of the simultaneous elections held in Indonesia some time ago. The formulation of the problem in this study is how the role of political parties in political socialization (a case study of the cadre school by the DPC PDI Perjuangan Bantul in 2016). The method used in this research is qualitative. The subject of this research is the administrator of the DPC PDI Perjuangan Bantul. The object of the research is the role of the PDI-P political party in political socialization (case study cadre school by DPC PDI Perjuangan Bantul 2016). The instruments of this research are interviews and documentation. The data analysis technique used descriptive qualitative analysis with data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the role of political parties in political socialization (a case study of the cadre school by the DPC PDI Perjuangan Bantul in 2016) has taken place and is implemented quite well. This conclusion is supported by the efforts of the Bantul PDI-P DPC in shaping the political attitudes of party cadres through cadre schools, regeneration systems, formal and informal discussions. And the establishment of a cadre school for regional head candidates is aimed at forming regional head candidates who are committed to implementing the party ideology and Trisakti, as part of the defense of national political, economic and cultural sovereignty.

Keywords: *Political Party, Political Socialization, Cadre School.*



1. PENDAHULUAN

Proses sosialisasi sendiri berlangsung dan berjalan seumur hidup dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dan proses ini berkembang didalam keluarga, sekolah, tempat kerja, organisasi keagamaan, dan partai politik. Selain itu juga sosialisasi politik menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik dari generasi muda yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letak dari peranan partai politik dalam memainkan peran sebagai sarana atau alat sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya sendiri dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dll.

Dari sisi lain fungsi dari sosialisasi politik untuk partai politik merupakan upaya dalam rangka membuat citra (image) bahwa pada dasarnya partai politik memperjuangkan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Selain itu ada lagi yang lebih penting yaitu apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yaitu mampu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional. Dan secara khusus perlu disebutkan bahwa di negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional dan integritas nasional (Miriam Budiardjo, 2008: 408).

Sosialisasi sendiri merupakan hal yang terpenting dalam upaya membentuk budaya politik suatu masyarakat dalam sebuah negara. Terutama negara yang menganut paham atau asas demokrasi seperti negara indonesia sendiri. karena kehidupan politik merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), yang telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Namun selama ini prakteknya dalam hal sosialisasi politik terutama dalam hal sekolah kader atau pendidikan partai, pada kenyataannya masih banyak partai politik yang belum memandang sekolah kader atau pendidikan partai sebagai bagian dari fungsi sosialisasi politik. Namun ada gagasan yang berbeda yang dibuat oleh salah satu partai politik yang ada di Indonesia yaitu PDI Perjuangan menjelang PILKADA serentak yang diadakan di



Indonesia beberapa waktu lalu. PDI Perjuangan mendeklarasikan membentuk atau membuat sekolah kader seperti yang dilansir atau dimuat dalam kompas.com sebagai berikut:

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Firman Manan menilai Sekolah Partai bagi Calon Kepala Daerah yang digelar PDI Perjuangan patut diapresiasi karena akan memperkuat kapabilitas calon tersebut. "Inisiatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengadakan sekolah calon kepala daerah patut diapresiasi," kata Firman di Jakarta, Minggu (28/6/2015). Menurut dia, ada tiga hal kenapa gagasan tersebut patut diapresiasi. Pertama, sebagai upaya memperkuat kapasitas personal calon kepala daerah dari sisi kompetensi dan integritas calon sehingga mampu bersaing dalam pilkada sekaligus memiliki kesiapan untuk mengelola pemerintahan apabila terpilih menjadi kepala daerah. "Kedua, membantu calon kepala daerah untuk merumuskan visi, misi serta tawaran kebijakan yang prorakyat dengan mengacu pada ideologi partai sehingga ideologi partai akan tergambar dalam visi, misi serta program yang diusung para kader PDI-P yang akan bertarung dalam pilkada," paparnya. Ketiga, lanjut dia, konsolidasi partai untuk membangun strategi pemenangan sehingga dukungan mesin partai dalam menghadapi pilkada dapat dioptimalkan. "Dengan demikian, sekolah calon kepala daerah akan memberikan kontribusi positif terhadap tampilnya calon-calon kepala daerah yang berkualitas sekaligus menegaskan arah perjuangan PDI-P dalam membangun daerah," tuturnya. Seperti diketahui, PDI-P secara resmi telah membuka sekolah partai untuk calon kepala daerah angkatan pertama, yang akan mengikuti pilkada serentak pada akhir tahun ini. Acara pembukaan itu dilakukan di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dengan dihadiri ratusan kader dan calon kepala daerah, Minggu. Saat berbicara di hadapan peserta sekolah partai itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno putri mengingatkan para calon kepala daerah yang maju ke pilkada serentak untuk benar-benar bekerja keras. Diharapkan para calon kepala daerah tak sekadar memanfaatkan PDIP sebagai kendaraan politik. "Kami hanya merekomendasikan, kalian lah para calon yang harus berjuang mati-matian. Partai akan mendorong dengan menggerakkan seluruh lapangan yang bisa kami lakukan," kata Megawati.

Dilihat dari berbagai teori dan penjelasan mengenai pentingnya fungsi partai politik serta berita mengenai sekolah kader yang dibentuk oleh partai PDI Perjuangan, maka dalam sosialisasi politik tersebut jelas bahwa partai politik mempunyai andil yang sangat besar, maka dari itu penulis ingin meneliti "Peran Partai Politik Dalam Sosialisasi Politik (Studi Kasus Sekolah Kader Oleh DPC PDI Perjuangan Bantul 2016)".



Selain itu berdasarkan hasil observasi sementara yang penulis telah lakukan pada tanggal 19 Januari 2016 di DPC PDI Perjuangan Bantul. Untuk peran sosialisasi politik DPC PDI Perjuangan sendiri sepertinya sudah berjalan, karena dilihat dari DPC PDI Perjuangan Bantul yang sudah mulai memberdayakan kantor DPC dengan membuka kantor untuk kepentingan partai dan anggota-anggotanya ataupun kepentingan masyarakat luas. Dan sudah berupaya melakukan berbagai hal yang bisa dikatakan merupakan pelaksanaan dari fungsi sosialisasi politik itu sendiri yaitu seperti ceramah-ceramah, diklat, serta diskusi-diskusi mengenai politik.

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan masalah yang sudah dilakukan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sekolah kader oleh DPC PDI Perjuangan Bantul.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan peran partai politik dalam sosialisasi politik oleh DPC PDI Perjuangan Bantul berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Menurut Sugiyono (2013:298) yang dimaksud subjek penelitian kualitatif adalah “subjek sebagai narasumber atau partisipan, subjek yang memberi informasi dalam penelitian”. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pengurus DPC PDI Perjuangan Bantul.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah peran DPC PDI Perjuangan Bantul dalam sekolah kader tahun 2016. Di dalam penelitian ini sendiri peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur. Dan wawancara dalam penelitian ini ialah bertujuan untuk mengetahui sekolah kader oleh DPC PDI Perjuangan Bantul. Pengumpulan dokumentasi yang dilakukan sendiri berupa struktur kepengurusan di DPC PDI Perjuangan Bantul, arsip dari sekolah kader atau kaderisasi (materi dan rundown acara) serta foto yang berkaitan dengan pelaksanaan dari sekolah kader atau kaderisasi di DPC PDI Perjuangan sendiri.

Dalam penelitian ini, analisis datanya menggunakan teknik: a) pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan wawancara di lapangan b) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan c)



penyajian data, dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut d) Tahap penarikan kesimpulan harus disesuaikan dengan tahap tersebut untuk menjamin keabsahan data dan kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

DPC PDI Perjuangan Bantul. Pembentukan sikap politik anggota-anggota partai adalah dimana partai wajib mendidik atau memberikan pendidikan melalui kaderisasi (sekolah kader) selain itu juga membiasakan kader peduli dengan masyarakat dan lingkungan sekitar agar muncul dengan sendirinya sikap politik yang baik. partai ikut membantu dan menolong masyarakat. Seperti menjembatani masyarakat dengan pemerintah jika terjadi permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Karena pembentukan sikap politik anggota partai yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Bantul merupakan salah satu peran partai dalam sosialisasi politik. Dan upaya partai dalam membentuk sikap politik anggotanya adalah untuk membantu kader-kader partai dalam merumuskan visi misi yang sesuai dengan Ideologi partai ataupun Ideologi Bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa DPC PDI Perjuangan Bantul sendiri telah berupaya dalam membentuk sikap politik yang baik bagi para kadernya. Dengan tujuan agar kader-kadernya mampu menerapkan hasil dari pendidikan politik baik berupa diskusi formal ataupun informal dan sekolah kader (kaderisasi) yang telah diberikan oleh partai. Karena mampu berkomunikasi dengan rakyat adalah bukti bahwa kader mampu menerapkan sikap dari hasil sekolah kader (kaderisasi) itu sendiri. Dan partai wajib memfasilitasi hal itu semua karena partai sebagai wadah para kader untuk membentuk sikap politik yang baik .

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo (2008: 407) mengenai fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik bahwa “Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.”

Selanjutnya, pencitraan partai merupakan salah satu cara yang ada dalam fungsi sosialisasi partai dimana partai berusaha menunjukkan kepada masyarakat bahwa partai memperjuangkan kepentingan umum. Dan berdasarkan hasil dari wawancara di DPC PDI Perjuangan Bantul. Pencitraan partai adalah upaya dimana partai berusaha membentuk dan menjaga citra partai yang telah ada di dalam partai dengan selalu konsisten berpihak kepada



uwong cilik. Jadi dapat disimpulkan dari jawaban narasumber bahwa hal pokok dalam pencitraan partai terhadap masyarakat adalah partai mendekati diri terhadap masyarakat. Dengan menerima dan mendengarkan keluhan-keluhan yang ada, jadi sebagai partai tidak hanya diam tapi ikut membantu.

DPC PDI Perjuangan Bantul berusaha untuk membentuk dan menjaga citra partai yang telah ada yaitu dengan selalu konsisten membela kepentingan masyarakat. Karena seperti yang diketahui PDI Perjuangan sendiri adalah partai dengan branded “Partainya uwong cilik”. Dan upaya dalam menjaga hal itu semua dapat dilihat dari upaya partai dalam memberdayakan mulai dari kantor dan para kadernya dalam rangka membantu persoalan-persoalan hidup yang dialami masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui sisi yang lain dari sosialisasi politik adalah menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum seperti yang dikatakan oleh Miriam Budiardjo di dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu politik (2008: 407) “Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum.”

Menurut Miriam Budiardjo (2008: 408) mengatakan bahwa Ada yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi politik yang satu ini, yaitu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional atau kepentingan umum. Dilihat dari penjelasan yang telah dijelaskan mengenai latar belakang didirikannya sekolah kader dan sejak kapan sekolah kader mulai muncul, dapat disimpulkan bahwa yang meletarbelakangi berdirinya sekolah kader adalah karena PDI Perjuangan sendiri menginginkan calon-calon pemimpin dari kadernya yang berkompeten yang istilahnya tidak akan gagap ketika menduduki kursi kepemimpinan. Selain itu juga agar kader-kader yang akan menjadi calon pemimpin menjadi kader yang paham akan sejarah dari bangsa dan komitmen cita-cita dari didirikannya bangsa ini.

Seperti yang dikutip dari Kompas, 16 September 2016 bahwa “Tujuan dari sekolah partai adalah untuk melatih dan menyiapkan para calon kepala daerah yang di usung PDI-P menghadapi PILKADA. Para calon kepala daerah diajarkan cara menjalankan strategi kampanye dengan pendekatan gotong royong agar biaya politik bisa ditekan. Mereka juga dididik tentang pemerintahan yang bersih dari korupsi dan narkoba. Selain itu, pemahaman komperhensif para kader akan ideologi Trisakti juga diuji melalui penjabaran visi, misi, dan program tiap calon.” Oleh karena itu PDI Perjuangan mewajibkan kepada semua calon kepala



daerah untuk mengikuti sekolah kader. Sekolah kader untuk calon kepala daerah ini merupakan program PDI Perjuangan dalam rangka membentuk para bakal calon kepala daerah yang memiliki komitmen dalam menjalankan ideologi partai dan Trisakti, sebagai bagian dari pertahanan kedaulatan politik, ekonomi dan kebudayaan Nasional.

Sistem kaderisasi itu sendiri yang pertama adalah proses rekrutmen, dan yang kedua para kader yang mengikuti di tempatkan di tengah-tengah masyarakat. Dan setelah itu penugasan 6 bulan terjun langsung di lapangan untuk mengimplementasikan hasil dari kaderisasi yang sebelumnya telah di dapat. Setelah memberikan hasil laporan dari penempatan di tengah-tengah masyarakat maka akan diberikan sertifikat yang akan menunjukkan dia telah lulus kader pratama atau madya ataupun utama. Dan untuk materi sendiri berkaitan dengan ajaran Soekarno, sejarah lahirnya pancasila. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya prinsip dari sekolah kader yang didirikan oleh PDI Perjuangan adalah meneruskan dari progam kaderisasi yang telah ada sebelumnya yang terdiri dari pratama untuk tingkat Kabupaten atau Kota, madya tingkat Provinsi, dan utama tingkat Pusat. Jadi sistem pendidikan yang diberikan partai sudah ada dari sejak pasca reformasi Tahun 2000 yang kemudian dikembangkan menjadi kaderisasi dan saat ini akan dikembangkan menjadi sekolah kader. Dengan harapan akan menghasilkan kader-kader yang mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik. Karena tujuan dari sekolah kader sendiri seperti yang diatur di dalam Anggaran Dasar partai perihal sekolah partai Pasal 88 Ayat 3 adalah Sekolah kader partai bertujuan untuk:

- 1) Membentuk kader partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan;
- 2) Mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin partai, bangsa, dan negara; dan
- 3) Menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Pelaksanaan dari sekolah kader sendiri sifatnya nasional atau di DPP dimana seluruh kader dari PDI Perjuangan akan dijadikan satu dalam satu tempat untuk mendapatkan pendidikan di sekolah kader. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dimana kader-kader sebelum terjaring dan masuk sekolah kader sebelumnya telah mengikuti sistem kaderisasi umum. Jadi PDI Perjuangan telah berupaya menjadi wadah atau tempat para kader untuk memperoleh ilmu agar kelak ketika menjadi pemimpin akan menjadi pemimpin yang



diharapkan sesuai dengan visi misi partai sendiri ataupun cita-cita bangsa. Dan hal tersebut termasuk peran partai dalam sosialisasi politik, yaitu partai wajib untuk mendidik kader-kadernya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh Miriam Budiardjo di dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu politik (2008:408) yang menjelaskan bahwa “Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi politik yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional.” Dilihat dari kekuatan organisasi PDI Perjuangan terutama dilingkup DPC PDI Perjuangan Bantul adalah seperti dengan adanya pemberdayaan kantor dan pemberdayaan para kadernya. Serta adanya tahapan seleksi didalam sekolah kader atau kaderisasi yaitu dari yang umum ke khusus. Selain itu pun jika ada para kader yang kiprahnya sudah tidak sesuai dengan visi misi dari partai atau cita-cita bangsa maka kader tersebut tidak akan dicalonkan kembali untuk menjadi calon pemimpin contohnya seperti Rutriningsih mantan Bupati Kebumen 2 periode Atau bahkan bisa di pecat dari kader atau anggota partai, seperti yang terjadi saat PILKADA Tahun 2015 kemarin di DPC PDI Perjuangan Bantul.

Tentu dapat dikatakan bahwa PDI Perjuangan terutama DPC PDI Perjuangan Bantul tergolong kedalam partai kader. Karena di dalam buku Rahman (2007: 105) Miriam Budiardjo sendiri menjelaskan bahwa “Partai Kader ialah Kekuatan partai ini terletak pada keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan seleksi terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang ditetapkan.”

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sekolah kader oleh DPC PDI Perjuangan Bantul Tahun 2016, sebagai berikut.

Membentuk sikap politik kader partai agar para kader terus berjuang melalui wadah PDI Perjuangan dan terus bersama meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota partai. Dengan dilakukan sekolah kader yang berupa kaderisasi tingkat pratama, madya, dan utama dengan metode pendidikan di kelas dua hari dan dua hari di lapangan yang mendatangkan guru tidak hanya dari luar tapi juga kepala daerah atau tokoh-tokoh sukses dari partai sendiri.



Kemudian diterjunkan ke tengah masyarakat selama 6 bulan untuk mengimplementasikan terhadap permasalahan di lingkungannya.

Membentuk dan menjaga citra partai dengan selalu konsisten membela kepentingan masyarakat. Dengan cara memberdayakan mulai dari kantor dan para kadernya dalam rangka membantu persoalan-persoalan hidup yang dialami masyarakat. Hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya mall atau toko jejaring modern di Bantul karena hal ini kaitannya dengan menjaga sistem perekonomian masyarakat kecil. Sesuai dengan branded PDI Perjuangan sendiri yaitu “Partainya uwong cilik”.

Mendidik pengurus partai, calon kepala daerah, dan kader yang akan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Bertujuan untuk membentuk komitmen dalam menjalankan ideologi partai dan Trisakti, sebagai bagian dari pertahanan kedaulatan politik, ekonomi dan kebudayaan Nasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Althof, Philip dan Rush, Michael. (1983). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haricahyono, Cheppy. (1991). Ilmu Politik Dan Prespektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- I., A. Rahman H. (2007). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maran, Rafael, Raga. (2001). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Ruslan, U, AM. (2008). Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin. Solo: Era Intermedia.
- Setiadi, Elly M, dan Kolip, Usman. (2013). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). Bandung: Alfabeta.



Sunarto, Kamanto. (1993). Pengantar Sosiologi. Depok: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Syarbaini, Syahrial. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tim Divaro, dan Yugha. (2014). Profil Partai Politik Peserta Pemilu. Jakarta: Erlangga.

Tim Redaksi. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zuhro, R. Siti, Dkk. (2009). Demokrasi Lokal Perubahan Dan Kewarganegaraan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Dan Bali. Yogyakarta: Ombak.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PDI Perjuangan

Sumber Surat kabar

Kedaulatan Rakyat 18 September 2016

Kompas 16 September 2016

Sumber Internet

(<https://www.facebook.com/notes/pdi-perjuangan/sejarah-berdirinya-pdi-perjuangan/38674421731/> diposkan 6 desember 2008 diakses 01 januari 2016 08:04)

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan diakses 31 Agustus 2016 16:42

<http://pilkada.liputan6.com/read/2381815/pdip-yogyakarta-pecat-kadernya-yang-membelot-saat-pilkada> di akses 09/09/2016 14:49

(<http://nasional.kompas.com/read/2015/06/29/03354371/Sekolah.Partai.Ala.PDI.Perjuangan>. Diapresiasi. Diakses 29 januari 2016 07:53)



<http://nasional.sindonews.com/read/1107527/12/hasto-pdip-selalu-rendah-hati-dan-jaga-tradisi-otokritik-1462896909> diakses 04/09/2016 23:25

<http://pdiperjuangan.id/article/category/detail/104/Fokus/Kepala-Daerah-Terpilih-Harus-Jalankan-Ideologi-Trisakti> PDI Perjuangan, 10/Jan/2016 diakses 31/08/2016 16:55

<http://www.pdi-perjuangan.or.id> diakses 01 Januari 2016 07:56.